1. Contoh penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab kehidupan antara lain mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Bukti bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka terkait dengan penerapan nilai tersebut adalah ...
 - A. Nilai-nilai yang ada di masyarakat selalu mendapat fungsi dalam ideologi Pancasila
 - B. Isi dari nilai-nilai Pancasila merupakan bagian dari hasil interaksi dengan ideologi lain
 - C. Nilai-nilai Pancasila membuka dan dengan perkembangan nilai-nilai sosial masyarakat
 - D. Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebagai tujuan merubah nilai-nilai dalam Pancasila
 - E. Nilai-nilainya merupakan tuntutan konkret,operasional dan mutlak yang tidak dapat di arsipkan

Pembahasan :

Sebagai ideologi terbuka, Menurut Dr. Alfian Pancasila telah memenuhi persyaratan kualitas **tiga dimensi**. Tiga dimensi tersebut, secara ringkas didefinisikan sebagai berikut:

- **Dimensi realita**, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut bersumber pada nilai-nilai riil dalam masyarakat.
- **Dimensi idealisme**, yaitu bahwa ideologi tersebut harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik.
- **Dimensi fleksibilitas**, yaitu bahwa ideologi mengandung atau memiliki keluwesan yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan pemikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

Sebagai ideologi terbuka, dimensi fleksibilitas pancasila mengandung tiga hal yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Adapun definisi ringkas nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai Dasar

Nilai dasar adalah nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap (tidak berubah), nilai-nilai ini terdapat dalam Pembukaan UUD 194. Nilai-nilai dasar Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial) contoh pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nilai Instrumental

Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar yang dijabarkan dalam bentuk UUD 1945 dan undang-undang. Contoh pasal UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu dan peraturan perundang2an lainnya

Nilai Praksis

Nilai Praksis adalah penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental berupa tindakan nyata, sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. contoh menghargai teman yang berbeda agama dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Salah satu dampak negative dari globalisasi adalah memudarnya rasa nasionalisme, lunturnya nilai-nilai budaya, memudarnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, informasi yang diperoleh tidak bisa di saring dengan baik dan benar, munculnya benturan budaya. Tantangan Pancasila dalam menghadapi dampak globalisasi tersebut adalah
 - A. Merubah nilai-nilai dasarnya agar menyesuaikan diri dengan arus perkembangan globalisasi
 - B. Mentrasformasi nilai-nilai dari ideologi yang berkemabng di negara maju agar sejalan dengan globalisasi
 - C. Pancasila harus mampu menolak semua nilai-nilai budaya yang berasal dari luar dirinya
 - D. Pancasila digunakan sebagai penyaring informasi dan menjaga nilai-nilai bangsa Indonesia agar tetap sejalan dengan globalisasi
 - E. Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan paham atau ideologi yang banyak dianut oleh masyarakat dunia

Pembahasan :

Pancasila, ideologi negara Indonesia, memainkan peran penting dalam era globalisasi untuk menjaga **identitas dan karakter bangsa**. Pancasila berfungsi sebagai filter budaya dan nilai-nilai yang membantu Indonesia beradaptasi dengan perubahan global tanpa kehilangan jati diri.

3. Pada hakikatnya pembangunan nasional berdasarkan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seluruhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan tujuan terciptanya keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang uruh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut fungsi Pancasila dalam proses pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter adalah
 - A. Cita cita dalam pembangunan nasional yang mensejahterakan rakyat
 - B. Pedoman bagi generasi muda dalam memperkuat jati diri bangsa
 - C. Sumber dari segala sumber hukum yang manaungi kehidupan
 - D. Sarana pencapaian tujuan nasional mencapai masyarakat adil dan makmur
 - E. Acuan hukum dalam pembuatan kebijakan publik dan kebijakan nasional

Pembahasan :

Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai **acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan** hasil-hasil pembangunan nasional.

Dalam hal karakter berarti sifat atau sikap dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan khususnya pembangunan manusia

4. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia memiliki arti
 - A. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
 - B. Pancasila yang ada sejak negara Indonesia berdiri dan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai perwujudan dari hak asasi manusia**
 - C. Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang serba majemuk
 - D. Pancasila sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau untuk mengatur penyelenggaraan negara
 - E. Pancasila sebagai pedoman tingkah laku atau petunjuk bagi setiap warga negara Indonesia

Pembahasan :

Pancasila sebagai perjanjian luhur memiliki makna bahwa Pancasila merupakan hasil perumusan dari founding father. Penggalan nilai-nilai luhur yang disepakati tersebut di finalisasi dalam sidang PPKI I 18 Agustus 1945 yang menandakan nilai Pancasila sudah ada sejak awal kemerdekaan.

5. Setiap bangsa di dunia memiliki keunikan tersendiri dari bangsa-bangsa lainnya. Melalui hal tersebut kita dapat saling mengenal antar bangsa-bangsa tersebut. Keragaman suatu bangsa adalah sebuah kekayaan yang sangat besar nilainya dalam upaya memperkuat nilai persatuan. Bangsa Indonesia terlahir sebagai bangsa majemuk yang multikulturalis. Aneka ragam budaya dalam wujud adat istiadat, bahasa lokal atau daerah bahkan agama dan kepercayaan yang dianut masyarakatnya menjadi ciri yang mewarnai kehidupan bangsa yang tersebar di seluruh bentangan wilayah kepulauan Nusantara. Keanekaragaman budaya yang dipadu dengan keterpisahan geografik sebagai ruang hidupnya menjadikan bangsa ini sebagai satu-satunya bangsa dengan tingkat keunikan tertinggi. Oleh karena itu, maka perlu setiap warga negara menjaga kemajemukan tersebut agar dapat hidup berdampingan dengan damai. Bila hal tersebut dapat diwujudkan maka Indonesia bukan tidak mungkin akan menjadi bangsa yang kuat di dunia dengan karakter kemajemukan yang dimilikinya sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Salah satu bentuk praktis yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam menjaga kebhinekaan bangsa adalah
 - A. Meningkatkan kesadaran hukum terhadap segala kebijakan negara yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali bagi seluruh suku-suku di nusantara
 - B. Memperkuat jiwa kecintaan terhadap bangsa Indonesia dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara dari berbagai suku-suku di Nusantara
 - C. Meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dan melakukan kampanye Bahasa Indonesia di seluruh wilayah Nusantara kepada seluruh suku di nusantara

- D. Ikut serta dalam berbagai kegiatan masyarakat dengan ragam suku dalam upaya membangun lingkungan baik pembangunan manusia maupun sarana dan prasarannya
- E. Melakukan pembinaan kesetiakawanan antar warga negara dalam menciptakan kehidupan yang aman dan damai di wilayah Indonesia

Pembahasan :

Bentuk praktis yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah ikut serta dalam berbagai kegiatan masyarakat. Apabila dilihat dari berbagai jawaban lain hal-hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau kelompok yang lebih besar.

- 6. Kualitas idealisme harus dimiliki oleh sebuah ideologi agar mampu bertahan dalam menghadapi perubahan masyarakat. Kualitas idealisme tersebut berguna untuk ...
 - A. Menunjukkan kemampuan ideologi tersebut yang mencerminkan realita yang hidup dalam masyarakat dimana dia muncul pertama kali
 - B. Memengaruhi kemampuan ideologi tersebut dalam menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang mengikutinya
 - C. Menentukan kemampuan ideologi tersebut dalam memberikan harapan kepada masyarakatnya untuk membangun masa depan yang lebih baik
 - D. Memberikan kegunaan dalam kehidupan praktis sehari-hari, yaitu sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan dari keadaan masyarakat
 - E. Menciptakan gagasan sendiri mengenai kebaikan bersama atau gambaran kehidupan masyarakat negara yang hendak diwujudkan

Pembahasan :

Sebagai ideologi terbuka, Menurut Dr. Alfian Pancasila telah memenuhi persyaratan kualitas **tiga dimensi**. Tiga dimensi tersebut, secara ringkas didefinisikan sebagai berikut:

- **Dimensi realita**, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut bersumber pada nilai-nilai riil dalam masyarakat.
- **Dimensi idealisme**, yaitu bahwa ideologi tersebut harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik.
- **Dimensi fleksibilitas**, yaitu bahwa ideologi mengandung atau memiliki keluwesan yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan pemikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

Sebagai ideologi terbuka, dimensi fleksibilitas pancasila mengandung tiga hal yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Adapun definisi ringkas nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai Dasar

Nilai dasar adalah nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap (tidak berubah), nilai-nilai ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai dasar Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial) contoh pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nilai Instrumental

Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar yang dijabarkan dalam bentuk UUD 1945 dan perundang-undangan. Contoh pasal UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu dan peraturan perundang2an lainnya

Nilai Praksis

Nilai Praksis adalah penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental berupa tindakan nyata, sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. contoh menghargai teman yang berbeda agama dalam kehidupan bermasyarakat.

7. Fenomena global dalam proses globalisasi memiliki berbagai dimensi yang saling berkaitan dan saling memengaruhi sehingga memunculkan berbagai dampak Ideologi Pancasila akan mampu menghadapi tantangan tersebut bila ...
 - A. **Membangun kembali kesadaran bahwa Pancasila sebagai identitas nasional**
 - B. Pengkajian kembali untuk membandingkan Pancasila dengan ideologi lain
 - C. Penyusunan ulang format pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila
 - D. Mengidentifikasi kebenaran hakiki antara Ideologi Pancasila dengan paham lain
 - E. Penanaman kesadaran bahwa Pancasila sebagai sumber tertib hukum tertinggi

Pembahasan :

Pancasila, ideologi negara Indonesia, memainkan peran penting dalam era globalisasi untuk menjaga **identitas dan karakter bangsa**. Pancasila berfungsi sebagai filter budaya dan nilai-nilai yang membantu Indonesia beradaptasi dengan perubahan global tanpa kehilangan jati diri.

8. Pancasila selain sebagai pandangan hidup juga sebagai dasar negara Indonesia. Latar belakang penerapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara adalah
 - A. Merupakan usulan Ir. Soekarno sebagai tokoh proklamator Indonesia
 - B. Mengandung nilai-nilai yang luhur sesuai dengan masyarakat Indonesia
 - C. Disepakati oleh wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai anggota BPUPK
 - D. **Kesepakatan nasional yang disepakati oleh para tokoh pendiri negara**
 - E. Memiliki nilai-nilai dasar yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan

Pembahasan :

Pancasila sebagai perjanjian luhur memiliki makna bahwa Pancasila merupakan hasil perumusan dari founding father. Penggalan nilai-nilai luhur tersebut disepakati dalam Sidang PPKI 18 Agustus dan ditetapkan sebagai dasar negara.

9. Pancasila berlaku sebagai pedoman dalam perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu perlu dikembangkan sikap positif dalam mengimplementasikan nilai-nilainya, seperti ...
- A. Mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan kelompoknya
 - B. Mengembangkan sikap toleransi dan bekerjasama dalam setiap bidang kehidupan**
 - C. Bersikap antipati terhadap perubahan yang terjadi pada perkembangan global
 - D. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
 - E. Bangga terhadap Pancasila sebagai ideologi terbaik dari paham yang berkembang

Pembahasan :

Sikap toleransi dan bekerjasama merupakan sikap yang ada dalam nilai-nilai Pancasila.

10. Hubungan fungsional antara Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dengan UUD NRI 1945 terdapat dalam pernyataan berikut ini, yaitu ...
- A. Mengamandemen UUD NRI Tahun 1945 berarti merubah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
 - B. Penafsiran terhadap sila-sila Pancasila harus berpedoman dan bersumber pada UUD NRI Tahun 1945**
 - C. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 memiliki kesetaraan dalam kedudukannya sebagai sumber tertib hukum
 - D. Implementasi sila-sila Pancasila yang salah akan berakibat pada proses amandemen UUD NRI Tahun 1945
 - E. Secara yuridis ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Pancasila

Pembahasan :

Hubungan Fungsional antara Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum di Indonesia merupakan titik penafsiran pertama Pancasila dalam ranah hukum. Penafsiran Pancasila tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena merupakan penafsiran pertama Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

11. Dampak kekalahan Jepang melawan Sekutu pada Perang Dunia II terhadap situasi Indonesia adalah...
- A. Kekosongan kekuasaan di Indonesia yang mendorong untuk segera diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia.**
 - B. Masuknya kembali Belanda ke Indonesia untuk meneruskan penjajahan Hindia Belanda.
 - C. Tampilnya PPKI menambah beberapa anggota tanpa persetujuan Jepang.
 - D. Indonesia menjadi rebutan Sekutu, yakni Belanda dan Inggris.
 - E. Indonesia memutuskan segala hubungan dengan kekaisaran Jepang.

Pembahasan :

Menyerahnya Jepang terhadap sekutu didahului oleh pembentukan badan yang menyelidiki kemerdekaan Indonesia. Pembentukan badan tersebut merupakan propaganda janji kemerdekaan Indonesia yang direalisasikan oleh Jepang. Menyerahnya Jepang terhadap sekutu dan proklamasi kemerdekaan merupakan puncak dari janji-janji kemerdekaan Jepang terhadap Indonesia.

12. Bung Hatta memiliki peran dalam rangkaian Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peranan Bung Hatta adalah...
- A. Membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta.
 - B. Mengusulkan agar yang menandatangani teks Proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia.
 - C. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Mr. Achmad Soebardjo.
 - D. Mengetik naskah Proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno.
 - E. Ikut berangkat ke Rengasdengklok untuk mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan.

Pembahasan :

Tokoh yang menyusun teks proklamasi adalah Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Mr. Achmad Soebardjo, setelah disusun Sayuti Melik yang mengetik teks proklamasi tersebut.

13. Program kerja Kabinet Ali Sastroamijoyo yang memerintah pada 31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955 adalah...
- A. Menyelesaikan masalah inflasi ekonomi yang semakin meningkat.
 - B. Menumpas praktik-praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
 - C. Melaksanakan politik bebas aktif dengan bekerja sama dengan negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka.
 - D. Meningkatkan keamanan rakyat dan segera melaksanakan pemilihan umum.
 - E. Mengajukan pembatalan hasil KMB yang pernah membentuk RIS.

Pembahasan :

Program Kabinet Ali Satroamidjojo I (Koalisi PNI dan NU) – 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955

- 1. Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
- 2. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta melaksanakan pemilihan umum
- 3. Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
- 4. Penyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
- 5. Pelaksanaan politik bebas - aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB

6. Penyelesaian pertikaian politik

14. Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1830 menyelenggarakan sistem tanam paksa, karena...

- A. Sistem ini merupakan cara yang paling mudah untuk mengisi kas pemerintahan kerajaan Belanda.
- B. Hanya cara yang dapat dilakukan Belanda untuk mendapatkan penghasilan pemerintah.
- C. Sistem ini merupakan salah satu ketentuan dalam Kongres Wina.
- D. Usaha inilah yang dianggap dapat mengatasi krisis keuangan negeri jajahan.
- E. Sistem ini telah dijalankan oleh raja-raja Jawa sebelum kedatangan Belanda.

Pembahasan :

Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) diberlakukan oleh pemerintah Belanda di Indonesia karena beberapa alasan, terutama kesulitan keuangan yang dialami oleh pemerintah Belanda. Hal ini disebabkan oleh biaya perang, seperti Perang Jawa (1825-1830) dan Perang Belgia (1830-1831). Tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan kas Belanda dengan memaksa rakyat Indonesia menanam tanaman komoditas yang laku di pasar dunia, seperti kopi, tebu, dan kapas.

15. Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Ikrar Pemuda membawa pengaruh besar terhadap aktivitas Pergerakan Nasional Indonesia, diantaranya adalah...

- A. Pemuda memosisikan dirinya sebagai pemerhati organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia.
- B. terselesaikannya perbedaan pendapat antara golongan pemuda dengan golongan tua dalam pergerakan Indonesia.
- C. Memperkuat landasan perjuangan dalam bentuk persatuan untuk mencapai kemerdekaan.
- D. Sebagai pemicu lahirnya nilai-nilai persatuan dalam organisasi pergerakan.
- E. Menunjukkan dominannya peran serta golongan pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Pembahasan :

Ikrar ini menjadi tonggak sejarah pergerakan nasional Indonesia dan menjadi dasar bagi semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Tiga Poin Utama:

- Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia: Menegaskan komitmen untuk berkorban demi tanah air Indonesia.
- Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia: Menunjukkan kesadaran akan adanya satu bangsa Indonesia yang bersatu.

- Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia: Menghormati dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Sumpah Pemuda menjadi inspirasi dan motivasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

16. Indonesia menerapkan politik bebas aktif dalam berhubungan dengan negara lain. Pemaknaan “aktif” dalam politik bebas aktif adalah...
- A. Indonesia giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.
 - B. Indonesia aktif dalam menggalang kekuatan negara-negara berkembang di Asia Afrika agar mampu bertahan dalam suasana Perang Dingin.
 - C. Indonesia aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan negara-negara di Kawasan Asia Afrika dan menghimpun wadah baru sebagai kekuatan tandingan dua kubu di Perang Dingin.
 - D. Indonesia aktif dalam persahabatan internasional terutama dalam menggalang kekuatankekuatan baru yang tergabung dalam New Emerging Forces (NEFO).
 - E. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional dan global, termasuk dalam pakta-pakta pertahanan untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Pembahasan :

Prinsip ini menegaskan komitmen Indonesia untuk “bebas” dalam menentukan sikap atas masalah-masalah internasional dan terlepas dari kutub-kutub kekuatan dunia, serta “aktif” berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dunia

17. Ada beberapa faktor yang menjadikan VOC mengalami kebangkrutan. Dari sekian faktor tersebut, faktor manakah yang paling relevan untuk dijadikan sebagai pembelajaran bangsa adalah...
- A. Rendahnya kemampuan VOC dalam memantau monopoli perdagangan.
 - B. Berlangsungnya perlawanan rakyat secara terus-menerus dari berbagai daerah di Indonesia.
 - C. Kelemahan kekuatan militer yang dimiliki VOC.
 - D. Banyaknya pegawai VOC yang korupsi.
 - E. Ketidakpedulian para pejabat VOC terhadap kesengsaraan rakyat.

Pembahasan :

Berikut beberapa penyebab utama kemunduran VOC:

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme:

Pegawai VOC sering menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri, yang menyebabkan berkurangnya pendapatan dan kerugian bagi perusahaan.

Persaingan Dagang:

VOC mengalami persaingan ketat dengan perusahaan dagang lain, seperti Inggris dan Prancis, yang menyebabkan penurunan pendapatan.

Masalah Keuangan:

VOC mengalami masalah keuangan akibat perang dan hutang yang membengkak, serta anggaran belanja yang membengkak.

Perubahan Politik di Belanda:

Perubahan politik di Belanda, termasuk perkembangan liberalisme, juga berdampak pada VOC.

Tidak Efektifnya Pengawasan:

Pengawasan yang kurang efektif dari Dewan Heeren Zeventien, yang seharusnya mengawasi VOC, menyebabkan masalah manajemen dan korupsi.

Perang:

Perang dan konflik yang berkelanjutan, baik di Asia maupun Eropa, juga menguras sumber daya keuangan VOC.

Perdagangan Gelap:

Perdagangan gelap yang berkembang pesat juga menantang monopoli perdagangan VOC.

18. Latar belakang ekonomi berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) adalah...
- A. Reaksi terhadap monopoli pembelian bahan baku dengan harga murah yang dilakukan oleh kaum bangsawan yang sangat merugikan pedagang Islam.
 - B. Reaksi terhadap monopoli penjualan bahan baku oleh pedagang Cina yang dirasakan sangat merugikan pedagang Islam.
 - C. Sebagai respon terhadap permintaan pasar yang sangat tinggi terhadap komoditas rempah-rempah terutama dari konsumen muslim.
 - D. Sebagai respon terhadap penjualan barang yang tak terkontrol baik dari segi jumlah, jenis, dan harga dari pedagang Islam.
 - E. Reaksi orang Islam terhadap maraknya pembentukan partai dari berbagai kalangan untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang ekonomi.

Pembahasan :

Latar belakang ekonomi berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) adalah keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi pedagang Muslim pribumi di Indonesia, terutama di tengah persaingan dengan pedagang keturunan Tionghoa yang lebih dominan dalam sektor perdagangan.

19. Perjanjian Linggarjati diselenggarakan tanggal 11 November 1946 antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda. Salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah...
- A. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura.
 - B. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
 - C. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1948.
 - D. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara-negara bagian RIS.
 - E. RIS harus berkonsultasi pada kerajaan Belanda dalam menentukan arah politik

Pembahasan :

Isi Perjanjian Linggarjati:

1. **Pengakuan Wilayah RI:** Belanda mengakui secara de facto wilayah RI yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura.
 2. **Penarikan Belanda:** Belanda wajib meninggalkan wilayah RI selambat-lambatnya 1 Januari 1949.
 3. **Pembentukan RIS:** Belanda dan RI sepakat untuk membentuk RIS sebelum 1 Januari 1949.
 4. **Uni Indonesia-Belanda:** RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda di bawah kepemimpinan Ratu Belanda.
20. Dalam ketatanegaran Indonesia, Pemilu 1955 bertujuan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Pernyataan yang tepat tentang konstituante adalah...
- A. Lembaga legislatif hasil Pemilu 1955 yang bertugas menyusun Undang Undang Dasar.
 - B. Lembaga legislatif hasil Pemilu 1955 yang bertugas mengesahkan kembali UUD 1945.
 - C. Lembaga majelis setingkat MPR yang bertugas merumuskan undang-undang baru
 - D. Lembaga setingkat DPR dan DPA sebagai lembaga tinggi negara yang dipilih langsung oleh rakyat
 - E. Lembaga pengontrol negara dan perumus Undang Undang Dasar.

Pembahasan :

Badan Konstituante adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan khusus untuk membuat atau merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) baru bagi suatu negara.

21. Konstitusi negara Indonesia terdapat istilah hierarki konstitusi dengan posisi tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai Peraturan Daerah. Keberadaan konstitusi menegaskan batasan-batasan hubungan negara dengan negara, hubungan negara dan warga negara serta hubungan warga negara dengan

warga negara, administratif warga negara. Konstitusi dijalankan supaya menjadi negara yang lebih tertib secara hukum dan administratif, konstitusi Indonesia dibuat secara vertikal mulai dari yang sifatnya lebih umum hingga spesifik. Selain itu, konstitusi memiliki sifat horizontal sehingga memiliki hubungan antara konstitusi yang setingkat maka sudah semestinya sebagai warga negara harus taat dalam upaya menjadikan situasi negaralebih aman dan kondusif. Kelengkapan konstitusi Indonesia telah cukup baik dan memuat jaminan hak-hak dan kewajiban negara dan warga negara. Di bawah ini yang merupakan fungsi dasar Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah

- A. Undang-Undang menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga mudah dipahami oleh pemerintah dan warga negara sebagai subjek yang akan menjalankan konstitusi tersebut
- B. Undang-Undang menjabarkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga maksud dan tujuannya lebih terarah dalam pelaksanaannya
- C. Undang-Undang merupakan pengarah normatif dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh pemerintah dan warga negara
- D. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi standar pelaksanaan sistem yang dimuat dalam Undang-Undang supaya tidak menyimpan terlalu jauh daripada apa yang dibahas di dalam Undang-Undang Dasar 1945
- E. Menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Undang-Undang agar terhubung secara vertikal dan tidak melampaui Batasan yang telah ditetapkan

Pembahasan :

Fungsi dasar Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai implementasi dan penjabaran norma hukum yang tertuang dalam UUD 1945. Undang-Undang mengatur lebih detail mengenai hak dan kewajiban, kekuasaan negara, serta berbagai aspek lain yang diatur secara umum dalam UUD 1945

22. Bentuk pemerintahan yang dianut oleh Indonesia semenjak merdeka hingga saat ini adalah republik. Hal yang melatarbelakangi Indonesia menganut bentuk pemerintahan republic adalah
- A. Bentuk pemerintahan dimana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi hingga pemerintahan berasal dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat
 - B. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki fenomena tingkat heterogenitas yang sangat tinggi
 - C. Jumlah penduduk yang sangat besar dengan kekayaan alam melimpah maka Indonesia cocok dengan bentuk pemerintahan republik
 - D. Indonesia adalah sebuah negara merdeka dan berdaulat sehingga bebas menentukan sendiri bentuk pemerintahan yang akan di pakai

E. Situasi politik menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki keberagaman yang sangat kompleks

Pembahasan :

Bentuk Pemerintahan Republik lebih bisa mengakomodir perbedaan yang beragam di Indonesia.

23. Penyelesaian masalah yang menyangkut konflik antar kampung dapat di selesaikan melalui musyawarah yang di hadiri oleh para tokoh masyarakat dan perwakilan pemuda. Mereka membuat kesepakatan Bersama untuk tidak saling menyerang dan menyerahkan pada proses hukum terhadap tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum warga masyarakat. Kegiatan penyelesaian konflik tersebut merupakan perwujudan pokok pikiran pertama dalam pembukaan UUD NRI 1945, yaitu
- A. Hendak mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia
 - B. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sertaperwujudan nilai kemanusiaan yang luhur
 - C. Berdasarkan atas Ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
 - D. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh sumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan**
 - E. Hendak mewujudkan kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan/permusyawaratan dan perwakilan

Pembahasan :

Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI 1945 sesuai TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

Pertama	Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan dan kesatuan (Sila ke-3).
Kedua	Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke-5).
Ketiga	Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (Sila ke-4).
Keempat	Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (Sila ke-1 dan ke-2).

24. Dalam kehidupan masyarakat terjalin komunikasi yang baik antara anggota masyarakat, mereka selalu Bersama setiap persoalan yang dihadapi dengan musyawarah mufakat, mereka hidup rukun saling menghargai dan menghormati antar sesama. Pentingnya budaya demokrasi dalam hubungan antaranggota masyarakat tersebut adalah

- A. Terwujudnya masyarakat yang mandiri sehingga meningkatkan beban pemerintah
- B. Terwujudnya suatu masyarakat modern berdasarkan paham sosialisme
- C. Akan terwujud suatu masyarakat yang harmonis, selaras, serasi, dan seimbang
- D. Terjalin hubungan yang saling menguntungkan dalam kehidupan masyarakat
- E. Menciptakan masyarakat yang homogen sehingga tidak ada lagi potensi perpecahan

Pembahasan :

Budaya demokrasi sangat penting dalam hubungan antar anggota masyarakat karena menjamin keadilan, partisipasi, dan kebebasan berekspresi. Dengan adanya demokrasi, semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan, menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai perbedaan.

25. Wawasan Nusantara sering didefinisikan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. Perlu adanya langkah dan sikap dalam mewujudkan NKRI yang kuat, tanggung dan bermartabat antar warga negara dan pemerintah. Pemerintah melakukan berbagai upaya dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan terkait perwujudan wawasan nusantara sebagai jalan mencapai tujuan NKRI. Berikut adalah salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan penerapan wawasan nusantara di bidang ekonomi adalah
- A. Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
 - B. Membangun tol laut untuk mempercepat persebaran logistik ke seluruh daerah dengan biaya yang standar
 - C. Menstabilkan harga barang untuk memperkuat daya beli masyarakat
 - D. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial
 - E. Memperkuat UMKM untuk menstabilkan dan memperkuat perekonomian bangsa

Pembahasan :

Wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi menekankan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia secara merata dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Ini termasuk pembangunan ekonomi yang seimbang di semua daerah, dengan tujuan mengurangi kesenjangan dan memastikan semua daerah dapat menikmati kemakmuran.

26. Warga negara yang baik adalah warga negara yang cinta terhadap bangsa dan negaranya. Ia mau berkorban apa saja untuk kepentingan bangsanya. Berikut ini merupakan indikator yang menandai kecakapan kewarganegaraan dalam perwujudan nasionalisme yaitu
- A. Mampu membedakan setiap budaya daerah
 - B. Memahami lambang dan bahasa nasional

- C. Memahami sejarah bangsa Indonesia
- D. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila
- E. Memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban

Pembahasan :

Indikator yang menandai kecakapan kewarganegaraan dalam perwujudan nasionalisme adalah kemampuan untuk memahami dan menghargai nilai-nilai dasar Pancasila, kesadaran akan identitas nasional, partisipasi aktif dalam kehidupan politik, serta pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan.

27. Dalam kenyataan saat ini, di Indonesia masih kerap kita jumpai konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan suku, agama, ras atau antargolongan tertentu. Hal ini menunjukkan belum adanya kesadaran akan sikap

- A. Komitmen persatuan dalam keberagaman di Indonesia
- B. Menyamakan kebudayaan yang beragam di Indonesia
- C. Menyamaratakan kebudayaan yang ada di Indonesia
- D. Membandingkan setiap budaya yang ada di Indonesia
- E. Kepedulian untuk melestarikan kebudayaan di Indonesia

Pembahasan :

Komitmen persatuan dalam keberagaman di Indonesia sangat penting untuk menjaga kerukunan dan keamanan nasional. Keberagaman adalah ciri khas Indonesia, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan ini merupakan kunci untuk membangun bangsa yang harmonis dan maju. Hal ini mencakup menghargai perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan bahasa, serta menghindari diskriminasi dan SARA.

28. Sebagai bangsa yang besar dan beraneka ragam karaktermasyarakatnya, bangsa Indonesia memerlukan komitmen akan persatuan dan kesatuan agar pembangunan bangsa dapat berjalan dengan baik. Komitmen persatuan dan kesatuan bangsa akan tegak jika

- A. Peraturan yang mengatur masalah suku atau hak individu ditegakkan dengan baik
- B. Ada peraturan yang dibuat
- C. Penegak hukum dapat berlaku dengan adil
- D. Masyarakat sadar akan hukum
- E. Sistem sanksi yang berlaku diperberat

Pembahasan :

Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga komitmen persatuan dalam keberagaman: Saling menghargai dan menghormati, toleransi, gotong royong, menjaga kerukunan, cinta tanah air, menghindari berita palsu, **patuh pada peraturan**, menghindari ujaran kebencian, menumbuhkan rasa kebersamaan, membina komunikasi yang baik.

29. Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri, maka hal yang akan terjadi adalah
- A. Cita-cita bangsa Indonesia hanya akan menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud
 - B. Kebudayaan daerah tidak akan berkembang
 - C. Pembangunan nasional tidak menghasilkan apa-apa
 - D. Masyarakat hidup tidak dengan layak
 - E. Ekonomi nasional tidak akan bangkit

Pembahasan :

Jika persatuan bangsa tidak diimplementasikan maka tujuan atau cita-cita bersama juga tidak akan bisa diwujudkan.

30. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 3, apabila DPR tidak menyetujui RAPBN dan Presiden, maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah
- A. Mengajukan kembali RAPBN setelah melakukan perbaikan pada hal-hal yang dianggap perlu
 - B. Tetap menjalankan APBN sesuai rencana yang diajukan meski tidak disetujui DPR
 - C. Menunggu keputusan DPR selama 30 hari dan menjalankan APBN sesuai rencana yang diajukan meski tetap tidak disetujui DPR
 - D. Menjalankan APBN tahun yang lalu
 - E. Merancang APBN yang baru untuk kemudian kembali diajukan kepada DPR

Pembahasan :

Pasal 23 UUD NRI 1945

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, **maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.**
- (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
- (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
- (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

31. Upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenal dengan peninjauan kembali. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar ...

- A. Pemohon telah menggunakan upaya hukum banding
- B. Penjatuhan hukuman yang terlalu ringan atau berat
- C. Terdapat kekeliruan hakim atau kekhilafan yang nyata dalam putusan
- D. Putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum
- E. Terpidana menyatakan menerima hasil putusan kasasi

Pembahasan :

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender, dalam hal:

- Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada pada pihak yang berperkara;
- Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang);
- Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- **Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata**, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

32. Keberadaan hukum internasional yang mengatur hubungan atau persoalan dalam lingkup nasional, pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut, kecuali ...
- A. Menjamin keseimbangan hubungan antar masyarakat
 - B. memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara setara di mata hukum
 - C. Menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri
 - D. Menjamin unsur kepastian dalam setiap hubungan yang terjalin
 - E. Menjamin integrasi bangsa dan negara

Pembahasan :

Hukum internasional, meskipun mengatur hubungan antar negara, memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan dan persoalan dalam lingkup nasional. Hukum internasional membantu **menciptakan ketertiban, keadilan, dan kerjasama di tingkat global**, serta

mempengaruhi bagaimana negara-negara mengatur hubungan internal mereka. Hukum internasional dapat mendorong negara-negara untuk **mengadopsi atau mengubah hukum nasional mereka agar sesuai dengan standar internasional.**

33. Unsur-unsur yang berkaitan dengan hukum internasional :

1. Orang perseorangan
2. Lembaga negara
3. Negara
4. Pemberontak
5. Organisasi massa

Berdasarkan unsur-unsur tersebut yang merupakan subyek hukum internasional terdapat pada nomor ...

- A. 1,2 dan 3
- B. 2,4 dan 5
- C. 2,3 dan 4
- D. 3,4 dan 5
- E. 1,3 dan 4

Pembahasan :

Subjek Hukum Internasional:

- **Negara:** Subjek utama hukum internasional, memiliki kedaulatan dan hak untuk menjalin hubungan dengan negara lain.
- **Organisasi Internasional:** Subjek hukum internasional dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam konvensi internasional, contohnya PBB.
- **Palang Merah Internasional:** Subjek hukum internasional yang lahir karena sejarah dan memiliki fungsi khusus.
- **Individu:** Dalam beberapa hal tertentu, individu dapat menjadi subjek hukum internasional, misalnya dalam konteks kejahatan internasional.
- **Pemberontak dan Pihak Sengketa:** Dalam hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan sebagai pihak bersengketa.

34. Rakyat dalam suatu wilayah negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk dalam suatu wilayah negara adalah ...

- A. Orang yang bertempat tinggal dan berdomisili untuk suatu jangka waktu tertentu
- B. Orang yang mempunyai kewenangan menjadi pemilih dalam pemilihan umum
- C. Sekelompok orang yang memiliki hubungan emosional dengan wilayahnya
- D. Orang yang telah bertempat tinggal dan berdomisili dalam jangka waktu yang lama
- E. Sekelompok orang yang berasal dari asal-usul dan keturunan yang sama

Pembahasan :

Penduduk, dalam konteks kependudukan dan hukum, didefinisikan sebagai semua orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di suatu wilayah negara tertentu, baik itu warga negara Indonesia maupun orang asing. Penduduk juga dapat didefinisikan sebagai jumlah manusia yang menempati wilayah atau negara tertentu selama minimal satu tahun.

35. Terdapat beberapa pihak yang meragukan efektivitas sistem demokrasi dalam menyelesaikan permasalahan di suatu negara. Bagaimana budaya demokrasi dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya?
- A. Dengan memperkuat kekuasaan pemerintahan atas masyarakat
 - B. Dengan membatasi akses informasi terkait tindakan pemerintah
 - C. Dengan meningkatkan partisipasi politik warga negara
 - D. Dengan meniadakan hak-hak individu dalam masyarakat
 - E. Dengan membudayakan sikap aktif dalam masyarakat

Pembahasan :

Budaya demokrasi meningkatkan efektivitas pemerintahan dengan cara :

- Meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik
- Meningkatkan akuntabilitas
- **Meningkatkan partisipasi masyarakat**
- Meningkatkan efisiensi
- Menjaga stabilitas politik
- Meningkatkan kualitas kebijakan

36. Perubahan sistem pemerintahan yang terjadi sepanjang era orde lama, orde baru, dan orde reformasi di Indonesia menciptakan dinamika yang berbeda dalam praktik demokrasi. Pada era orde reformasi, beberapa elemen demokrasi mengalami perubahan signifikan. Elemen demokrasi yang berkembang pada era orde reformasi mencakup
- A. Adanya kontrol ketat pemerintah terhadap media massa
 - B. **Pembentukan lembaga independen untuk mengawasi proses pemilu**
 - C. Pembatasan jumlah partai politik yang bisa berpartisipasi dalam pemilu
 - D. Penekanan pada persatuan nasional dalam proses politik
 - E. Adanya kebijakan proteksionis dalam perekonomian

Pembahasan :

Lahirnya UU No 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dengan dibentuk sebuah lembaga yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

37. Era Orde Reformasi di Indonesia menandai perubahan signifikan dalam praktik demokrasi, terutama dalam hubungan antara legislatif dan eksekutif. Salah satu

perbedaan perilaku demokratis pada masa Orde Reformasi jika dibandingkan dengan era Orde Lama adalah

- A. Peran parlemen yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan politik
- B. Adanya kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan sektor swasta
- C. Peningkatan keterlibatan rakyat dalam proses politik secara aktif
- D. Perubahan dalam sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer
- E. Peningkatan keberpihakan pemerintah terhadap partai politik tertentu

Pembahasan :

Perbandingan pada era Orde Lama dan era Reformasi, era Orde Lama peran dari parlemen masih kurang secara konstitutif maupun praktek dalam penyelenggaraan ketatanegaraan sedangkan dalam era Reformasi pasca amandemen UUD 1945 menguatkan peran parlemen dalam pemerintahan disertakan juga dalam praktek pemerintahannya.

38. Perubahan demokrasi di Indonesia dari masa Orde Baru ke Orde Reformasi dipicu oleh beberapa faktor. Salah satu latar belakang utama perubahan ini adalah
- A. Adanya krisis ekonomi yang memengaruhi stabilitas politik dan sosial di Indonesia
 - B. Keinginan rakyat untuk mengakhiri praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan
 - C. Adanya perubahan konstelasi politik global yang memengaruhi hubungan internasional Indonesia
 - D. Kebutuhan untuk memperkuat kelembagaan dan mekanisme pengawasan pemerintahan
 - E. Perlunya meningkatkan keadilan ekonomi dan pembagian sumber daya nasional

Pembahasan :

Latar belakang beralihnya pemerintahan dari era Orde Baru ke Reformasi adalah :

- Krisis ekonomi
- Korupsi Kolusi dan Nepotisme
- Penyalahgunaan kekuasaan
- Pemerintahan yang otoriter
- Aksi demonstrasi besar-besaran

39. Kehidupan demokrasi di suatu negara sangat dipengaruhi oleh peran pers yang bebas dan independen. Pers bebas merupakan salah satu instrumen yang dapat membantu dalam mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan dan menyampaikan informasi yang penting kepada masyarakat. Dari pernyataan di atas, pentingnya pers dalam kehidupan demokrasi adalah
- A. Mengkritisi pemerintah, sehingga pemerintah akan selalu bekerja keras
 - B. Memberikan informasi yang menguntungkan kebijakan pemerintah

- C. Menjamin pemerintahan yang demokratis yang bersih dari korupsi
- D. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat
- E. Pers bebas akan menghindari munculnya pemerintahan otoriter

Pembahasan :

Peran Pers dalam kehidupan demokrasi adalah pers yang bebas memperjuangkan kebenaran, pers yang bebas akan membuat kekuasaan yang bertanggung jawab, dan pers yang bebas memberi informasi kepada masyarakat dan memperkuat demokrasi.

40. Di suatu desa diadakan acara Musyawarah Desa. Acara ini diadakan untuk membahas berbagai masalah yang terjadi di desa tersebut. Para pemimpin dan warga desa berkumpul untuk membahas masalah yang dihadapi dan mencari solusi terbaik. Dalam musyawarah ini, semua pendapat didengarkan dengan seksama dan setiap orang diberikan kesempatan untuk berbicara dan memberikan masukan. Setelah diskusi panjang, para pemimpin dan warga desa mencapai kesepakatan yang terbaik untuk desa mereka. Dampak positif jika anggota masyarakat menerapkan budaya demokrasi dalam hubungan antaranggota masyarakat tersebut adalah

- A. Meningkatkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan
- B. Menjaga stabilitas politik di negara demokrasi
- C. Mengurangi ketidakpuasan anggota masyarakat
- D. Meningkatkan kekuasaan elit politik dalam masyarakat
- E. Mengurangi intervensi pemerintah daerah dalam urusan masyarakat

Pembahasan :

Penerapan budaya demokrasi dalam hubungan antaranggota masyarakat memiliki dampak positif seperti menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, meningkatkan kualitas keputusan, **keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat**, meningkatkan rasa memiliki dan akuntabilitas, serta mencegah konflik dan meningkatkan kerukunan. Dengan demikian, masyarakat yang demokratis cenderung lebih harmonis dan sejahtera.

41. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anak untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia jika ia lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing dan ayah Warga Negara Indonesia adalah ...

- A. Ia hanya dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia jika telah mengajukan permohonan
- B. Ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia secara otomatis karena ayahnya adalah WNI
- C. Ia hanya dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia jika statusnya diakui oleh ayahnya
- D. Ia tidak dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena ibunya adalah WNA
- E. Ia hanya dapat memperoleh status kewarganegaraan asing yang diturunkan ibunya

Pembahasan :

Pasal 4 UU No 12 Tahun 2006 - Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia adalah:

a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;

c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

42. Salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh masyarakat guna memperkuat penegakan hukum yang adil di Indonesia adalah dengan...
- A. Mengajukan petisi untuk menyerang institusi hukum
 - B. Menghindari proses hukum yang dianggap tidak adil
 - C. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban
 - D. Melakukan tindakan kekerasan terhadap pihak yang dianggap melanggar hukum
 - E. Mendirikan kelompok untuk melakukan tindakan protes terhadap kebijakan hukum yang tidak adil

Pembahasan :

Langkah yang bisa ditempuh oleh masyarakat untuk memperkuat penegakan hukum yang adil di Indonesia adalah dengan :

- Meningkatkan kesadaran hukum
- Menjunjung tinggi supremasi hukum
- Berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya proses hukum
- Menghindari tindakan melanggar hukum

43. Seorang individu lahir di Amerika Serikat dari orangtua Indonesia dan memiliki kewarganegaraan ganda antara Indonesia dan Amerika Serikat. Individu tersebut memutuskan untuk mempertahankan kewarganegaraan Amerika Serikat dan ingin melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Langkah apa yang harus dilakukan individu tersebut untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia?

- A. Mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia ke kedutaan besar Indonesia di Amerika Serikat.
- B. Menunggu sampai usianya telah mencapai 21 tahun lebih untuk dapat memilih kewarganegaraan asing secara otomatis.
- C. Menunggu sampai usia 30 tahun untuk secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
- D. Mendaftarkan diri ke kedutaan besar Amerika Serikat dan melepaskan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis.
- E. Mengurus surat keterangan ganda di kedutaan besar Indonesia dan melakukan permohonan naturalisasi warga negara asing.

Pembahasan :

Langkah-langkah untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia:

Mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia

Permohonan ini diajukan secara tertulis kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan HAM.

Permohonan diajukan ke perwakilan RI di luar negeri

Jika individu tersebut tinggal di luar negeri (misalnya, di AS), permohonan bisa diajukan melalui Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat. Mereka akan memverifikasi dan meneruskan permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Proses di Kementerian Hukum dan HAM

Setelah dokumen diterima dan diverifikasi, Kementerian Hukum dan HAM akan memproses permohonan dan menyampaikannya kepada Presiden. Presiden kemudian akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pelepasan kewarganegaraan.

Setelah Keppres keluar, individu tersebut resmi kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia.

44. Mana yang menjelaskan secara tepat mengenai hubungan antara asas kewarganegaraan dan kepastian hukum di suatu negara?
- A. Asas kewarganegaraan menjamin bahwa setiap warga negara dapat memilih dan dipilih dalam pemilihan umum
 - B. Asas kewarganegaraan menjamin bahwa setiap orang di negara tersebut memiliki hak yang sama
 - C. Asas kewarganegaraan menjamin bahwa setiap warga negara mendapat hak atas tempat tinggal di negara yang bersangkutan
 - D. Asas kewarganegaraan menjamin bahwa setiap orang di negara tersebut bebas untuk berpendapat dan berkumpul
 - E. **Asas kewarganegaraan menjamin bahwa hak dan kewajiban warga negara ditetapkan secara jelas dan pasti**

Pembahasan :

Asas kewarganegaraan dalam suatu negara berkaitan erat dengan kepastian hukum, karena melalui asas-asas ini negara menetapkan siapa yang diakui secara sah sebagai warga negara dan apa saja hak serta kewajibannya. Hal ini menciptakan kepastian hukum, yaitu kondisi di mana seseorang mengetahui dengan jelas status kewarganegaraannya dan konsekuensi hukum yang melekat pada status tersebut

45. Negara Z memiliki asas kewarganegaraan yaitu 'ius domicilii', yang berarti kewarganegaraan diperoleh dari tempat tinggal. Latar belakang negara Z yang memengaruhi asas kewarganegaraannya adalah ...
- A. kebijakan pemerintah negara Z untuk menarik investor asing.
 - B. **kondisi geografis yang membuat negara Z menjadi tempat transit banyak imigran.**
 - C. sejarah penjajahan yang memengaruhi konsep identitas nasional negara Z.

- D. kebijakan pemerintah negara Z untuk menjaga kemurnian ras.
- E. tingginya tingkat migrasi di negara Z menimbulkan keinginan untuk membatasi jumlah warga negara.

Pembahasan :

Mobilitas penduduk yang tinggi (migrasi) membuat negara cenderung menerapkan *ius domicilii* agar penduduk yang telah lama tinggal di wilayahnya (walau bukan warga negara asli) dapat diintegrasikan secara hukum dan sosial sebagai warga negara

46. Seorang anak dari pasangan WNI lahir di negara "A" yang menganut tempat kelahiran sebagai dasar dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang. Berdasarkan undang-undang kewarganegaraan, status anak tersebut ...
- A. Dipperlakukan sama dengan warga negara Jerman
 - B. Berkewarganegaraan ganda sampai berusia 18 tahun
 - C. Bukan sebagai warga negara Indonesia
 - D. Mengajukan keberatan karena berkewarganegaraan ganda
 - E. Berkewarganegaraan ganda berdasarkan kekuatan hukum

Pembahasan :

Anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda karena mendapatkan kewarganegaraan dari tempat lahir (*ius soli*) dan keturunan (*ius sanguinis*) dari orangtuanya. Batas usia kewarganegaraan ganda akibat pernikahan campuran adalah 18 tahun atau sudah kawin.

47. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Persamaan warga negara dalam hukum di antaranya adalah
- A. Memiliki hak yang sama dapat di tuntutan oleh jaksa di pengadilan
 - B. Mendapat perlakuan yang sopan dalam proses persidangan di pengadilan
 - C. Mendapatkan penjelasan yang terinci apabila berhubungan dengan pidana
 - D. Mendapatkan penasehat hukum secara bebas tanpa ada paksaan
 - E. Memiliki hak untuk di dampingi pembela dalam persidangan di pengadilan

Pembahasan :

Pernyataan pada soal mengacu pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Ini berarti semua warga negara memiliki kedudukan yang **setara di mata hukum**, termasuk dalam **hal perlindungan hukum dan hak-hak dalam proses peradilan**.

48. Menurut Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, siapa saja yang dapat dikatakan berstatus sebagai warga negara Indonesia?

- A. Orang yang lahir di Indonesia dari orang tua yang berstatus warga negara Indonesia (WNI)
- B. Orang yang menikah dengan WNI dan telah tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut
- C. Orang yang memiliki pekerjaan di Indonesia selama minimal 5 tahun berturut-turut dan telah membayar pajak
- D. Orang yang telah tinggal di Indonesia selama minimal 2 tahun berturut-turut dan memiliki izin tinggal tetap
- E. Orang yang memiliki pendapatan di atas rata-rata nasional dan berdomisili di Indonesia selama minimal 10 tahun tidak berturut-turut

Pembahasan :

Pasal 4 UU No 12 Tahun 2006 - Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia adalah:

a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;

c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

49. Latar belakang suatu negara menentukan asas kewarganegaraan yang berlaku bagi warga negaranya ialah untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negaranya. Bagaimana penjelasan untuk pernyataan tersebut?

- A. Asas kewarganegaraan menentukan siapa yang berhak atas hak dan kewajiban warga negara
- B. Asas kewarganegaraan menentukan kebebasan untuk berbicara dan berpendapat bagi warga negara
- C. Asas kewarganegaraan menentukan hak orang asing untuk tinggal di negara tersebut
- D. Asas kewarganegaraan menentukan hak warga negara untuk menentukan pemimpin negara
- E. Asas kewarganegaraan menentukan hak warga negara untuk bepergian ke luar negeri

Pembahasan :

Pernyataan dalam soal menekankan kepastian hukum bagi warga negara. Dalam konteks kewarganegaraan, asas kewarganegaraan sangat penting karena:

- Menentukan **siapa yang diakui secara sah sebagai warga negara** oleh suatu negara
- Menentukan **hak-hak** (seperti hak memilih, mendapatkan perlindungan hukum, akses pendidikan) dan **kewajiban** (seperti membayar pajak, wajib militer) yang dimiliki oleh individu
- Mencegah situasi tanpa kewarganegaraan (stateless) atau status ganda yang tidak diatur
- Mewujudkan kejelasan **status hukum** seseorang di hadapan negara dan lembaga hukum

50. Penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum Undang-Undang sehingga konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Maksud dari supremasi konstitusi adalah

- A. Keutamaan konstitusi dalam mengatur struktur pemerintahan dan hukum di suatu negara
- B. Keunggulan sistem pemerintahan yang diatur oleh konstitusi dibandingkan dengan sistem pemerintahan lain
- C. Kewenangan pemerintah untuk mengubah konstitusi tanpa batasan serta pengaruh dari manapun
- D. Keberhasilan konstitusi dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional
- E. Kemampuan konstitusi untuk menyelesaikan konflik antara berbagai kelompok politik dan sosial

Pembahasan :

Supremasi konstitusi berarti bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Semua peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan tindakan aparatur negara harus tunduk dan sesuai dengan konstitusi.

Dengan kata lain:

- Konstitusi menjadi dasar dan acuan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara
- Lembaga-lembaga negara hanya boleh bertindak sejauh yang diberikan oleh konstitusi
- Jika ada hukum atau kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi, maka dapat dibatalkan (misalnya melalui Mahkamah Konstitusi di Indonesia)